

**DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL DI KOTA BONTANG,
KALIMANTAN TIMUR**

Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.I.P., M.PP

alfirdaus_laila@yahoo.com

Uci Dewi Purwanti

Purwantiuci09@gmail.com

Deartemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kota Bontang membahas tentang model dan prestasi politik keluarga dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk fenomena yang terjadi, penekanan penelitian ini adalah interpretif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta putra mereka Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang ada di Kota Bontang. Sedangkan untuk model dinasti politik yang dimiliki oleh kota Bontang adalah model arisan dan model lintas ruang, dimana model arisan diwujudkan dengan memberikan regenerasi kekuasaan kepada keluarga politik, sedangkan model ruang silang diwujudkan oleh keluarga. pembagian penguasaan oleh suami dan istri serta ibu dan anak yang berkuasa. eksekutif dan legislatif di kota bontang. Penelitian memiliki beberapa pendapat bahwa adanya garis darah dari keluarga pemerintah. Sekilas tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Terlebih jika mengacu pada dalil demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinasti politik yang berkembang selama ini telah mencederai esensi demokrasi itu sendiri.

Kata Kunci : Politik Dinasti, Politik Kekeluargaan, Demokrasi

ABSTRACT

Politics of Bontang City discusses the model and achievements of family politics in leading Bontang City. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods for the phenomena that occur, the emphasis of this research is interpretive. The results of this study found that the political family of Andi Sofyan Hasdam and Neni Moerniaeni and their son Andi Faisal Sofyan Hasdam have become political families in Bontang City. Meanwhile, the political dynasty model owned by the city of Bontang is the arisan model and the cross-space model, where the arisan model is realized by providing power regeneration to the political family, while the cross-spatial model is realized by the family. distribution of control by husbands and wives as well as mothers and children in power. executive and legislative in the city of bontang. Research has some opinions that there is a bloodline of the government family. At first glance there is nothing wrong with dynastic politics. Especially when referring to the democratic proposition that every citizen has the same right to be elected and to vote. However, it cannot be denied that the political dynasties that have developed so far have damaged the essence of democracy itself.

Keywords: Dynastic Politics, Family Politics, Democracy

I. PENDAHULUAN

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan. Menurut buku dengan judul Fenomena Politik Pemerintahan Desa : Politik dinasti merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih memiliki hubungan keluarga dekat yang saling mendukung dan secara bergantian menduduki kekuasaan melalui pemilihan pada periode masing-masing.

Menurut Leo Agustino politik dinasti adalah “kerajaan politik” dimana elit politik menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, atau bisa dikatakan membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis. Proses pergantian pimpinan merupakan sebuah pertarungan politik yang sangat menyerap beragam energi.¹ Pada sebuah pergantian kepemimpinan di negeri ini, pertarungan bukan semata pada seorang pemimpin yang akan memimpin organisasi, namun lebih dari itu, ruang pertarungan berada pada pertempuran ideologi. Begitu kuatnya pertarungan, terkadang mengundang kedatangan para pendahulu organisasi. Entah apa yang mereka cari, bisa jadi untuk melanggengkan kekuasaan, ataupun untuk

1 Agustino, Leo. (2014). Politik Lokal & Otonomi Daerah. Bandung: Alfabeta.

menguji nyali dan sisa remah-remah intervensi yang dimiliki ataupun merupakan sebuah upaya memperpanjang benang keturunan. Kota Bontang termasuk tempat dimana seorang yang ingin memimpin harus mengalahkan salah satu orang yang sudah lama menjadi pemimpin dan masih ingin melanjutkan kepemimpinan mereka untuk Kota Bontang yang lebih baik.

Politik dinasti ada beberapa model. Model politik dinasti di Indonesia menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ada tiga. Pertama model arisan, dimana kekuasaan hanya menggumpal pada satu atau keluarga, dan berjalan secara regenerasi. Kedua, dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misalnya kakak jadi bupati, adik jadi ketua DPRD, anggota keluarga memegang posisi strategis. Ketiga, model lintas daerah. Daerah beda dipimpin masih dalam satu keluarga.²

Perkembangan Indonesia sebagian menunjukkan kepada dimana dinasti politik itu dimanipulasi dengan elit local dan menjadikan ancaman bagi demokrasi. Para elit local memiliki akses pada lembaga-lembaga pusat dan mengandalkan konstituen local yang digalang melalui jaringan yang memperkuat dan mempertahankan hubungan patron-klien daerah. Tetapi, politik dinasti juga tumbuh dalam masyarakat monarki yang dimana kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota raja dari sebuah keluarga. Politik dinasti juga ada melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap segala macam prosedur demokrasi. Sehingga mereka seakan-akan tidak memberikan kesempatan pihak lain untuk melakukan regenerasi dan kaderisasi. Untuk membangun politik dinasti mereka melakukan mekanisme yang sudah terstruktur, meskipun hakekatnya tidak sesuai dengan substansi demokrasi.

Dalam analisis modern kemunculan politik dinasti diakibatkan oleh adanya kemandulan demokrasi. Sebab, hal ini yang kemudian secara structural mengakibatkan otonomi overdosis sehingga muncul kekuasaan etnis di daerah. Etnisitas ini menjadikan tumbuhnya dinasti, sementara etika politik rendah karena kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik. Yang menyebabkan otonomi overdosis munculnya kekuasaan etnis di daerah dengan adanya para politisi partai.

² <https://nasional.tempo.co/read/833610/3-jenis-dinasti-politik-di-indonesia-mulai-model-arisan-hingga-lintas-kamar>, diakses 18 September 2020, 20.30

Gaganya etnisitas otonomi daerah yang seharusnya menjadi media aktualisasi potensi-potensi local, justru melahurkan raja-raja baru yang tidak kalah eksploitasinya dengan system sentralistik.

Perihal masyarakat di suatu daerah sudah seharusnya memberikan sajian demokrasi yang bersih dan bermartabat. Munculnya ketergantungan organisasi partai pada figure pemimpin pucaknya ketimbang kinerja secara keseluruhannya sebagai instrument untuk melegitimasi kekuasaan. Dimana ketergantungan figure politik ini menyebabkan ranah politik dinasti atau politik kekerabatan akan muncul di dinamika politik selanjutnya. Praktik politik kekerabatan menjadi sah dilakukan apabila kandidat terkait dapat dipercaya dari segi kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Apabila terdapat kandidat yang terikat kekerabatan menyalahi aturan yang ada sebaiknya diberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dan seharusnya, masyarakat lebih mengetahui bahawa suatu proses politik itu ditangan rakyat bukan organisasi yang menggunakan hak mereka dengan memilih.

Dalam budaya feodalisme yang kental, dari sisi penguasa terlihat adanya kecenderungan berperilaku untuk selalu ingin dihormati, sementara dari sisi masyarakat terdapat kecenderungan untuk menganggap tinggi mereka yang memiliki status jabatan dan kekayaan. Masyarakat dengan kultur feodal berpendapat bahwa para pemimpin atau pejabat memang sudah merupakan suratan sebagai pemimpin atau pejabat, dan arena jabatannya penguasa harus dihormati dan dituruti. Masyarakat kurang memahami bahwa dalam pemerintahan yang menganut paham demokrasi, setiap orang (rakyat) bisa menjadi pejabat dan bisa punya kekayaan asalkan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan demikian keturunan pejabat bisa saja menjadi pemimpin atau pejabat, tetapi bukan karena mereka anak pemimpin/pejabat, tetapi karena memang memiliki pengetahuan dan layak untuk menjadi pemimpin. Para keturunan pejabat itu memiliki pengetahuan karena mereka lebih banyak memiliki dan diberi kesempatan, diterima saja oleh rakyat dengan pasrah dan tanpa protes, karena dianggap itu sudah hak mereka sebagai anak pejabat, padahal rakyat memiliki hak yang sama. Bisa juga kepasrahan itu karena ketidak berdayaan, dalam pemikiria walaupun protes, nasib mereka tetap sama, bahkan bisa ada biaya yang harus dibayar untuk itu.

Pengertian dinasti politik adalah tren politik kekerabatan. Indikasi munculnya praktik politik dinasti di Kota Bontang sudah terlihat sejak pilihan Walikota Bontang tahun 1999-2011 pada kepemimpinannya suami yaitu Andi Sofyan Hasdam.. Ketika itu, Neni Moernaeni telah menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang pada tahun 2008, setelah tahun 2014-2015 Neni Moernaeni menjadi Anggota DPR dan pada tahun 2016-2021 Neni Moernaeni menjadi Walikota Bontang. Dengan kepemimpinannya sekarang Neni Moernaeni mencalonkan kembali menjadi calon walikota Bontang untuk tahun 2021-2024. Dimana kualitas SDM dan kelembagaan parpol yang masih lemah banyak alasan mengapa politik dinasti tumbuh dengan subur. Ada banyak alasan politik dinasti tumbuh subur, baik dilihat dari factor budaya, kognitif-emosional, maupun social-ekonomi. Kecenderungan pengkultusan tokoh yang dikeilingi jejak feodalisme yang masih tampak jelas, struktur dan interaksi social yang masih bekesenjangan antar warga dalam ekonomi dan pendidikan, bisa jadi dengan alasan itu kekuatan dan keutamaan tokoh menjadi khusus.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai dan saling mendukung agar tidak menghasilkan kesimpulan yang tidak diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara kualitatif, yaitu tipe penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena apa yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan secara tertulis maupun lisan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

III. PEMBAHASAN

A. Politik Dinasti

Dinasti merupakan sistem reproduksi kekuasaan di era primitif karena hanya mengandalkan satu darah atau keturunan untuk menguasai kekuasaan.³ Secara tersirat dari pengertian politik dinasti sebenarnya adalah musuh dari demokrasi. Karena hakekatnya demokrasi mengandung pengertian rakyat sebagai suara mutlak dalam memilih penguasa. Artinya suara rakyat dalam dinasti politik tidak terakomodir. Dinasti politik mematikan suara rakyat dalam hal memilih pemimpin. Sementara itu memaknai politik dinasti sebagai upaya seorang penguasa atau pemimpin baik di tingkat presiden/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya, untuk menempatkan keluarganya sebagai calon penggantinya atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya.⁴

Istilah kekuasaan (power) sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sanggup untuk membuat sesuatu, sanggup untuk mempengaruhi orang, sanggup membuat perubahandan tanpa kekuasaan sesuatu tidak akan terjadi. Miriam Budihardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, dengan kata lain kekuasaan dapat diartikan dengan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.⁵

Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat (Novendra Bimantara, 2018).⁶ Rezim politik ini terbentuk

3 Susanti, Martien Herna. 2017. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia". *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, 111-119. *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 2, September 2017, pp. 111-119

4 Soemiarno, Slamet. (2010). *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit UI.

5 Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

6 Novendra Bimantara yang berjudul "ANALISIS POLITIK DINASTI DI KABUPATEN KEDIRI", Universitas Diponegoro, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21909> diakses pada

dikarenakan concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti dalam politik menciptakan suatu lingkaran kekuasaan diimana kedudukan keluarga, anak, dan koleganya (Abdurrahman, 2015, hlm.108). Lingkaran kekuasaan tersebut mencakup pada jabatan yang strategis yang bersifat satu garis instruksi maupun koordinasi dan jabatan yang didapat dari pemilihan umum seperti pilkada untuk menjadi pemimpin di suatu daerah.

Dalam kaum elit mereka akan mendapatkan keistimewaan politik dan elit local dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dinasti Politik dalam ranah politik local sangatlah berbeda dengan konteks dinasti politik yang terjadi dileel nasional. Dalam ranah local lebih meromantiskan nama besar mereka yang sudah familisime dalam menjamin suatu politik dinasti yang dapat menjadi eksis secara terus-menerus. Pola pengajuan kandidat bisa dilakukan secara spontan untuk menghalangi kandidat lain untuk maju dalam proses pengajuan kandidat. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekeluargaan menjadi patokan politik guna mengamankan kekuasaan daerah. Dalam model seperti ini kerap muncul transisi bahwa kekuasaan daerah hanya terjadi dalam satu rumah saja. Kekuasaan tidak dilakukan dengan begitu baik, melainkan hanya mengejar pragmatism politik saja. Masyarakat hanya menilai bahwa kerabat yang dicalonkan merupakan calon yang bisa diandalkan saat mereka terpilih menjadi pemimpin.

Djati (2013) dinasti politik merupakan akses negative dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terjebak (*Hijacked Democracy*) oleh sirkulasi hubungan inti Genealogis, berdasarkan relasi kekurangan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggan kekuasaan keluarga. Secara tidak langsung mengatakan, bahwa dinasti politik itu tidak selalu memiliki citra buruk di mata warga negara. Hal ini karena praktek demokrasi kepartaian selama lebih kurang satu setengah dekade terakhir semakin oligarkis dan proses rekrutmen politik didominasi oleh kapital. Persaingan elite politik tidak didasarkan atas kualitas komitmen mereka terhadap kebijakan publik yang memihak rakyat, melainkan transaksi kepentingan kekuasaan. Hal ini sudah barang tentu menjadi tanda lemahnya pengelolaan partai politik. Dalam pembangunan pada masa jabatan

Neni Moernaeni banyak penghargaan yang didapat dari hasil beliau menjabat. Keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, mencemaskan banyak kalangan karena dianggap semakin menyuburkan politik dinasti.⁷ Hal ini terjadi di Kota Bontang dalam penyelenggaraan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Hal ini kemudian memicu kalangan kerabat menjadi elit sebagai pemahaman dalam dinasti politik. Menurut Bathoro (2015, hlm. 115-125) dinasti politik dalam politik modern dikenal sebagai elit politik yang pberbasis pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Kelompok elit adalah sekelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka kadang relative mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Dalam partai ada dua pilihan yaitu partai nasional dan partai agama, setelahnya termasuk partai elite. Dimana partai berpindah dari satu partai ke partai lainnya untuk memiliki arus aliran agar bisa menunjukkan loyalitas lembaga itu baik atau buruk. Partai yang mengakses semua golongan, partai dengan representasi kelas sosial, dan partai dengan diferensiasi paham masyarakat. Tak heran jika “partai fraksi” muncul pasca kongres kekalahan dalam pemilihan. Kemunculan pernyataan politisi yang mendeklarasikan diri sebagai klien atas patron yang sedang berkuasa, bukan anggota, apalagi aktor politik. Parpol bukan menjadi organisasi politik, melainkan pelembagaan kepentingan yang membajak demokrasi dengan pola dan motif pemburu. Pemilihan bukan sekadar prestise partai sebagai organisasi, melainkan bagian dari driving goals. Perilaku partai mengikuti logika ini. Jika partai kalah di perolehan kursi terbanyak parlemen, belum tentu dia kalah untuk memimpin penyelenggaraan negara pasca-pemilu karena ruang menangkap kursi eksekutif bisa dilakukan tanpa menggantungkan pada proses pemilu legislatif yang sekuensial.

B. Budaya Politik Kota Bontang

⁷ Budhy Prianto, Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, , 2016, PUBLISIA (*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*).

Bicara mengenai partisipasi politik, salah satu hal yang mudah dilakukan oleh warga negara adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki perwakilan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan, melaksanakan Pemilu, hingga menetapkan pemenang Pemilu. Bahkan jauh sebelum itu, KPU bertugas untuk meverifikasi partai-partai yang dapat menjadi peserta pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilu tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi masyarakat, dalam hal ini KPU juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Salah satu upaya yang dilakukan KPU adalah dengan membentuk relawan demokrasi. Program pembentukan tim relawan demokrasi pertama kali dilaksanakan pada Pemilu 2014. Relawan demokrasi bertugas membantu KPU melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan tahapan pemilu. Pada Pemilu serentak 2019 ini, KPU kembali melaksanakan program relawan demokrasi sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih.

Dalam kondisi politik pada saat pemilu serentak pada tahun 2019 Kota Bontang berjalan sesuai rencana. Masyarakat mengikuti arahan dan proses yang sudah diberlakukan oleh petugas. Dalam perannya masyarakat berpartisipasi untuk menyuarkan hak mereka dengan pemilu serentak 2019. Dalam kasus yang ada di Kota Bontang adalah untuk pemula masih belum mengerti untuk memilih dengan cara mencoblos. Pelajar dengan umur 17 -18 tahun masih belum bisa membedakan bagaimana cara memilih yang benar. Tetapi dalam pemilu 2019 ini masyarakat lebih banyak berpartisipasi daripada tahun sebelumnya.

Pemilu 2019 yang dilaksanakan serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif, memiliki kerumitan tersendiri dengan banyaknya surat suara yang harus dicoblos. Relawan demokrasi yang dibentuk KPU melalui KPU Kabupaten/Kota, bertugas mensosialisasikan tahapan pemilu dan tata cara penggunaan hak suara serta tak lupa mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Keragaman latar belakang masyarakat, melandasi relawan demokrasi dibagi menjadi sebelas segmen, salah satunya adalah segmen keagamaan. Relawan demokrasi segmen keagamaan merupakan upaya KPU bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama, untuk

mensosialisasikan pemilu dan mendorong partisipasi umat masing-masing agama dalam Pemilu 2019.

C. Kepemimpinan Politik dalam Partai

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menurut Surbakti (1992) lebih menunjukkan berlangsungnya suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan) dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (parpol dan organisasi kemasyarakatan). Kepemimpinan politik yang terjadi dalam partai yang ideal tidak ada bedanya dengan berbicara kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan politik dalam suprastruktur politik, yaitu lembaga pemerintahan yang disuplai melalui jalur parpol. Kondisi parpol di Indonesia masih dipandang jauh dari yang diharapkan terutama parpol local. Parpol local yang dinilai masih belum mampu membawa daerahnya menjadi figure kepemimpinan yang kuat dan mampu membawa bangsa keluar dari berbagai krisis multidimensi. Mayoritas parpol Kota Bontang masih menerapkan model kepemimpinan politik yang cenderung bersifat oligarki. Bisa dikatakan, perjalanan kepemimpinan parpol salah satunya ketika mengambil keputusan strategis hanya tergantung apa kata ketua umum dan elit-elit partai yang berkuasa.

Parpol secara internal mengadakan kaderisasi. Kaderisasi yang dilakukan harus dimaknai secara utuh dalam hal menyiapkan regenerasi dimasa yang akan datang. Dalam penjelasan umum UU No. 2/2008 tentang Partai Politik memberikan diskripsi bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggungjawab parpol dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipas politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Firmanzah (2007) baik buruknya system kaderisasi dan regenerasi dalam tubuh organisasi parpol akan menentukan kualitas calon-calo pemimpin bangsa. Sebagaimana tugas parpol yang paling utama adalah melakukan kaderisasi

untuk menyiapkan pemimpin masa depan melalui proses rekrutmen politik. Secara khusus proses rekrutmen kader partai politik adalah proses dimana individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Konteks Indonesia adalah kaderisasi kepemimpinan di masing-masing partai politik yang mengedepankan kualitas, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Proses regenerasi kepemimpinan adalah dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi aktualisasi pemimpin alternatif.⁸

D. Politik Dinasti Pemerintahan Kota Bontang

Organisasi Kota Bontang yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Partai politik berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas, terdiri atas beberapa orang yang berorganisasi dan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan. Suatu institusi politik yang mencari pengaruh dalam suatu Negara, dengan tujuan mengisi posisi strategis dalam pemerintahan dan beberapa hal. Partai politik dapat menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen ataupun pemerintahan dengan cara menarik simpati rakyat untuk memilih partai tersebut agar menang dalam pemilu. Semakin banyak simpati dari masyarakat maka semakin banyak pula yang akan memilih partai tersebut untuk menguasai parlemen. Setelah partai politik terpilih maka mereka harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai. Jika tidak, partai tersebut akan ditinggalkan oleh pendukungnya.

Roy C. Macridis, sebagaimana dikutip Ichlasul Amal, mengemukakan beberapa fungsi partai politik yang relative umum, yaitu representative/perwakilan, konversi dan agregasi, integrasi, persuasi, represi, rekrutmen dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta control terhadap pemerintah.⁹ Partai politik dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu bersifat historis mengenai kemunculan dan perkembangan sebuah partai atau lingkungan yang mengakibatkan munculnya partai dan sistem kepartaian. Pendekatan fungsionalis untuk mengkaji peran partai dalam satu Negara atau sistem politik. Memfokuskan

⁸ Anam Rifai, Khoiruddin Abbas, Romi Faslah, Saiful Arif, Sutomo, Partai Politik, Demokrasi dan Kebijakan Publik, Program Sekolah Demokrasi, Mojolangu-Malang; 2010, hlm. 85

⁹ Roy C. Macridis, dalam Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta; Tiara Wacana, 1996, hlm. 26

kepada ideology, partai harus mengetahui ideology partai dan system kepartaian. Di Negara demokrasi parpol berfungsi untuk mengatur kehendak umum yang kacau dan medidik warga Negara untuk bertanggungjawab secara politik. Parpol juga menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum dan memilih para pemimpin. Fungsi sitem kepartaian dapat diukur dari seberapa besarnya kontribusi partai kepada masyarakat, cara beroperasi system politik.

Kota Bontang kembali mencuat lantaran tak beda dengan pencalonan setiap tahun nya mereka mencalonkan diri mereka kembali. Dalam bentuk kekuasaan yang dicari, diraih, dibangun dan dipertahankan demi memfasilitasi kepentingan keluarga mengatasnamakan bangsa dan negara. Demokrasi digerogoti politik dinasti. Implikasinya, kehidupan masyarakat kecil tetap saja jauh dari sejahtera. Masyarakat yang memang kekurangan sebagian di bantu oleh pemimpin perempuan Kota Bontang. Tetapi, semakin mereka mendapatkan kemenangan karena lawan mereka kalah kuat sebagian dari mereka memamerkan kemewahan mereka dalam pemilihan.

Adanya perbedaan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa diakibatkan terdapatnya pihak yang berstatus sebagai superior di satu sisi dan pihak yang berstatus sebagai inferior di sisi lain berimplikasi pada terciptanya kewajiban untuk tunduk hingga pada gilirannya memunculkan hubungan yang bersifat tidak setara (asimetris). Hubungan semacam ini bila dilanjutkan dengan hubungan personal (non-kontraktual) akan menjelma menjadi hubungan patron-klien. Oleh karena itu, Wolf menekankan bahwa hubungan patron-klien bersifat vertikal antara seseorang atau pihak yang mempunyai kedudukan sosial, politik dan ekonomi yang lebih tinggi dengan seseorang atau pihak yang berkedudukan sosial, politik dan ekonominya lebih rendah. Ikatan yang tidak simetris tersebut merupakan bentuk persahabatan yang berat sebelah. Artinya cenderung kepada salah satu pihak.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Politik dinasti atau keluarga politik di Kota Bontang telah terjadi dan berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dimana pasangan keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam menjadi keluarga politik yang selalu eksis di Kota Bontang hingga sampai saat

¹⁰ Definisi Hubungan Patron-Klien”, http://www.academia.edu/36528160/Definisi_Hubungan_Patron-Klien diakses pada 18 April 2020, pukul 19:34

ini. Keunggulan modal politik, ekonomi dan kepercayaan masyarakat menjadikan keluarga politik dengan mudah menduduki posisi-posisi strategis melalui proses demokratis dengan memenangkan suara masyarakat melalui pemilihan umum baik Pemilihan Walikota Kota Bontang dan Pemilihan Legislatif DPRD Kota Bontang.

Dinasti politik terbentuk karena adanya jaringan kekuasaan yang menyebar dan kuat di sebuah daerah. Saat jaringan tersebut mendukung dinasti politik yang berkuasa, akan memungkinkan lahirnya kekuasaan absolut. Kalau kekuasaan itu absolut, logikanya, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Fenomena ini, boleh jadi sebagian orang menganggap wajar, namun sebagian lagi menganggap hal itu distorsi atau tekanan terhadap demokrasi. Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut konsolidasi demokrasi membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung. Munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2014). *Politik Lokal & Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Kartini Kartono, 1983, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, CV Rajawali, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bathoro, Alim. (2011). *Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi*.
Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, hlm. 115-125.
- Djati, Wasisto. R. (2013). *Revivalisme Kekuasaan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*. Jurnal Sosiologi Masyarakat, vol. 18, no. 2.
- Drs. H. Amin Ibrahim., M. D. (2013). *Diamika Politik Lokal (Konsep Dasar dan Implementasinya)*. Bandung: Sumpersari.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Tanjung, Akbar. (2007). *THE GOLKAR LAW Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.